

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Desember 2015

Kepada

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor : SE 41 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANTAUAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2015 DAN TAHUN BARU 2016

1. Dalam rangka Hari Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraannya untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, tertib dan lancar.
2. Pemantauan meliputi hal-hal terkait dengan aspek-aspek keselamatan, pelayanan dan keamanan pada prasarana dan sarana transportasi.
3. Pelaksanaan pemantauan di wilayah kewenangan Saudara melalui koordinasi berjenjang dengan Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal terkait) dan instansi lainnya seperti Polri, TNI, KemenPU-PERA, Kemenkes, KemenBUMN, BASARNAS, BMKG, BNPB, BUMN, serta elemen masyarakat (LSM dan Asosiasi).
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan secara berkala kepada Menteri Perhubungan dengan di tembuskan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

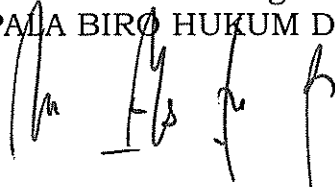
ttd

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Panglima TNI;
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
13. Kepala Badan SAR Nasional;
14. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
18. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
19. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
20. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
21. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
22. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia;
23. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
24. Asosiasi (INACA, INSA, ORGANDA, GAPASDAP).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001